



RANCANGAN AKHIR RENJA 2026



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan bagian dari siklus perencanaan tahunan yang bertujuan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah dengan visi, misi, serta tujuan strategis instansi kami.

Rancangan Akhir Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, masukan dari berbagai pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi Tahun 2025–2029. Melalui penyusunan Rencana Kerja ini, diharapkan pencapaian indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target walaupun terdapat beberapa penyesuaian sebagai akibat dari adanya perubahan regulasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan datang. Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 ini dengan segala keterbatasannya dapat bermanfaat khususnya untuk dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan internal dan umumnya bagi Pemerintah Kota Bekasi di dalam melaksanakan pembangunan terutama dalam hal pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2023.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.....	28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Kota Bekasi.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL KOTA BEKASI.....	63
BAB IV PENUTUP.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2025.....	14
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	29
Tabel 2.4	Review Terhadap Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	38
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2026	49
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Target Tahun 2025 – 2030.....	52
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.....	54
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2026.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi merupakan sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundangundangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka anggaran merupakan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Kerangka pendanaan merupakan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan pedoman pokok pembangunan untuk kurun waktu 1 (Satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun horisontal.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi diawali dengan proses penyampaian usulan masing-masing bidang, selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja. Setelah melalui berbagai masukan dilanjutkan dengan proses penetapan sebagai dokumen Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang berpedoman pada berbagai peraturan terkait. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun sebelumnya, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikator pembiayaan 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi mengacu pada RKPD Kota Bekasi. Oleh karena itu penyusunan Renja ini dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RKPD Tahun 2026. Selain itu, proses ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024. Target kinerja tahun 2026 dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 memiliki daya ungkit terhadap Visi Kota Bekasi yaitu **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”** serta Misi **“Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”**, yang merupakan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan dan sasaran yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Visi Misi Kota Bekasi 2025 – 2029 adalah **Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif** dengan Sasaran **Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima**. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki program prioritas **“KOBE BERKINERJA”** yang terdiri dari Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil dengan outcome yang diharapkan melalui program tersebut adalah

meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk dan meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 10);

18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 81);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 114);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 36);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 58);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 11).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan Rencana Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun, memuat usulan program dan kegiatan yang tercermin dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2026, ditetapkan dengan maksud :

1. Memuat program/kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai fasilitasi dari program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
2. Memuat rencana kinerja tahunan, kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD.

1.3.2 Tujuan

1. Memberikan acuan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2026;
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD untuk menjawab tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
3. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2026 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 (satu) Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
2. Bab 2 (dua) menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. Bab 3 (tiga) berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yaitu berisi usulan program dan Kegiatan;
4. Bab 4 (empat) berisi penutup yaitu Pencatatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
TAHUN 2025

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun 2025 triwulan II ditunjukkan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja PD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah, merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2025 dan prakiraan tingkat capaian kinerja Renstra s/d realisasi Tahun 2025 triwulan II sebagaimana yang tertera pada Tabel II.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 triwulan II.

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
								I		II		III		IV			
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100%	36.767.586.434,00	2,41	4.860.386.415,00	21,63	6.257.091.025,00	15,03	5.946.846.449,00	60,99	15.406.030.832,00	100,06	32.470.354.721,00
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				100%	36.767.586.434,00	2,41	4.860.386.415,00	21,63	6.257.091.025,00	15,03	5.946.846.449,00	60,99	15.406.030.832,00	100,06	32.470.354.721,00
2.12.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	94,80%	26.753.456.180,00	94,80%	28.604.861.250,00	2,52	4.860.386.415,00	28,33	5.958.309.025,00	18,58	5.405.364.449,00	50,66	9.103.884.564,00	100,09	25.327.944.453,00
1.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	54.592.000,00	0	0	64,29	0	19,05	35.099.900,00	16,67	16.981.900,00	100	52.081.800,00
1.2.01.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2,00 Dokumen	4.592.000,00	0	0	2	0	0	0	0	2.432.000,00	2	2.432.000,00
1.2.01.4		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			2,00 Dokumen	25.000.000,00	0	0	1	0	0	10.350.000,00	1	14.549.900,00	2	24.899.900,00
1.2.01.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7,00 Laporan	25.000.000,00	0	0	3	0	4	24.749.900,00	0	0	7	24.749.900,00
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90,92%		90,92%											
1.2.02		Administrasi Keuangan	Optimalisasi Pelayanan			100%	19.689.509.000,00	11,92	3.371.257.042,00	41,29	4.062.648.728,00	37,94	4.279.286.408,00	10	5.927.534.850,00	101,15	17.640.727.028,00

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Perangkat Daerah	Administrasi Perkantoran														
1.2.02.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			1.820,00 Orang/bulan	19.664.509.000,00	434	3.371.257.042,00	411	4.062.648.728,00	1.017,00	4.273.310.408,00	0	5.908.510.950,00	1.862,00	17.615.727.128,00
1.2.02.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5,00 Laporan	25.000.000,00	0	0	3	0	1	5.976.000,00	1	19.023.900,00	5	24.999.900,00
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	95,80%		95,80%											
1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalisasi Disiplin Aparatur			100%	726.333.000,00	0	0	0	0	0	0	100	589.931.552,00	100	589.931.552,00
1.2.05.2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			3,00 Paket	510.000.000,00	0	0	0	0	0	0	3	474.021.552,00	3	474.021.552,00
1.2.05.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			8,00 Orang	159.375.000,00	0	0	0	0	0	0	8	70.000.000,00	8	70.000.000,00
1.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			210,00 Orang	56.958.000,00	0	0	0	0	0	0	210	45.910.000,00	210	45.910.000,00
1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	1.238.537.950,00	0	0	42,86	8.294.860,00	14,29	250.865.440,00	42,86	675.742.242,00	100	934.902.542,00
1.2.06.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1,00 Paket	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1	13.866.120,00	1	13.866.120,00
1.2.06.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12,00 Paket	676.478.000,00	0	0	0	0	6	34.369.000,00	6	439.299.977,00	12	473.668.977,00
1.2.06.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12,00 Paket	70.000.000,00	0	0	0	0	6	34.398.000,00	6	35.301.800,00	12	69.699.800,00
1.2.06.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1,00 Dokumen	25.000.000,00	0	0	1	0	0	17.129.000,00	0	6.654.000,00	1	23.783.000,00
1.2.06.8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1,00 Laporan	30.000.000,00	0	0	1	0	0	17.253.000,00	0	7.455.000,00	1	24.708.000,00
1.2.06.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			1,00 Laporan	190.809.950,00	0	0	1	8.294.860,00	0	41.822.440,00	0	139.885.345,00	1	190.002.645,00

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
						I		II		III		IV					
						8		9		10		11		12=8+9+10+11			
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
1.2.06.10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1.000.000 ,00 Dokumen	231.250.000,00	0	0	0	0	0	105.894.000,00	1.000.000,00	33.280.000,00	1.000.000,00	139.174.000,00
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90,92%		90,92%											
1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	1.439.268.000,00	0	0	0	0	16,67	0	83,33	1.041.461.746,00	100	1.041.461.746,00
1.2.07.2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			12,00 Unit	768.000.000,00	0	0	0	0	6	0	6	566.100.000,00	12	566.100.000,00
1.2.07.5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2,00 Unit	448.000.000,00	0	0	0	0	0	0	2	280.100.186,00	2	280.100.186,00
1.2.07.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3,00 Unit	223.268.000,00	0	0	0	0	0	0	3	195.261.560,00	3	195.261.560,00
1.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Pelayanan Adminstrasi Perkantoran			100%	4.521.861.300,00	20,83	1.489.129.373,00	29,17	1.808.669.337,00	25	716.001.878,00	25	223.674.704,00	100	4.237.475.292,00
1.2.08.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12,00 Laporan	550.000.000,00	2	79.510.373,00	4	72.837.337,00	3	86.817.132,00	3	115.946.582,00	12	355.111.424,00
1.2.08.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12,00 Laporan	3.971.861.300,00	3	1.409.619.000,00	3	1.735.832.000,00	3	629.184.746,00	3	107.728.122,00	12	3.882.363.868,00
1.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	795.890.000,00	0	0	25,71	78.696.100,00	25	124.110.823,00	49,29	558.361.592,00	100	761.168.515,00
1.2.09.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6,00 Unit	225.430.000,00	0	0	3	44.208.400,00	0	72.756.314,00	3	93.639.163,00	6	210.603.877,00
1.2.09.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7,00 Unit	170.460.000,00	0	0	3	33.525.700,00	0	50.364.509,00	4	70.505.105,00	7	154.395.314,00

Kode	Sasaran RKPD	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
1.2.09.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10,00 Unit	50.000.000,00	0	0	1	962.000,00	0	990.000,00	9	46.692.500,00	10	48.644.500,00
1.2.09.9		Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1,00 Unit	350.000.000,00	0	0	0	0	1	0	0	347.524.824,00	1	347.524.824,00
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	88,88%			88,88%										
1.2.13		Penataan Organisasi	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	138.870.000,00	0	0	0	0	25	0	75	70.195.978,00	100	70.195.978,00
1.2.13.2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1,00 Laporan	68.888.000,00	0	0	0	0	0	0	1	31.551.220,00	1	31.551.220,00
1.2.13.3		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2,00 Dokumen	69.982.000,00	0	0	0	0	1	0	1	38.644.758,00	2	38.644.758,00
2.12.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	53,00%	4.151.148.922,00	53,00%	3.439.625.000,00	0	0	12,5	12.600.000,00	0	0	87,5	3.180.187.745,00	100	3.192.787.745,00
2.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	cakupan kepemilikan KK			100%	213.987.000,00	0	0	25	12.600.000,00	0	0	75	140.186.578,00	100	152.786.578,00
2.2.01.1		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			1,00 Dokumen	104.329.000,00	0	0	0	0	0	0	1	63.731.327,00	1	63.731.327,00
2.2.01.2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			2,00 Dokumen	109.658.000,00	0	0	1	12.600.000,00	0	0	1	76.455.251,00	2	89.055.251,00
2.2.03		Penyelenggara an Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KK			100%	3.225.638.000,00	0	0	0	0	0	0	100	3.040.001.167,00	100	3.040.001.167,00
2.2.03.3		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk			1,00 Laporan	3.000.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1	2.852.329.929,00	1	2.852.329.929,00
2.2.03.5		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			1,00 Laporan	225.638.000,00	0	0	0	0	0	0	1	187.671.238,00	1	187.671.238,00
2.12.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase kepemilikan Akte Kelahiran	95,00%	818.536.407,00	95,00%	1.439.943.000,00	6,67	0	0	10.500.000,00	6,67	146.900.000,00	86,67	1.212.609.399,00	100	1.370.009.399,00
3.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran			100%	1.140.330.000,00	16,67	0	0	10.500.000,00	16,67	146.900.000,00	66,67	928.252.599,00	100	1.085.652.599,00

Kode	Sasaran RKPd	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.2.01.1		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			120.000,0 0 Dokumen	148.750.000,00	0	0	0	0	0	142.400.000,00	120.000,00	4.744.800,00	120.000 ,00	147.144.800,00
3.2.01.2		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan			3,00 Layanan	991.580.000,00	1	0	0	10.500.000,00	1	4.500.000,00	1	923.507.799,00	3	938.507.799,00
3.2.02		Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran			100%	248.223.000,00	0	0	0	0	0	100	235.328.800,00	100	235.328.800,00	
3.2.02.8		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			1,00 Laporan	200.000.000,00	0	0	0	0	0	1	189.502.000,00	1	189.502.000,00	
3.2.02.10		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil			95,00 Orang	48.223.000,00	0	0	0	0	0	95	45.826.800,00	95	45.826.800,00	
3.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran			100%	51.390.000,00	0	0	0	0	0	100	49.028.000,00	100	49.028.000,00	
3.2.03.4		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			1,00 Laporan	51.390.000,00	0	0	0	0	0	1	49.028.000,00	1	49.028.000,00	
2.12.4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN	Persentase Pemanfaatan Data	33,00%	3.806.194.293,00	33,00%	3.173.717.184,00	0	0	20	275.682.000,00	20	394.582.000,00	60	1.815.675.847,00	100	2.485.939.847,00
4.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			100%	131.530.000,00	0	0	0	0	0	100	115.819.804,00	100	115.819.804,00	
4.2.01.2		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			1,00 Dokumen	131.530.000,00	0	0	0	0	0	1	115.819.804,00	1	115.819.804,00	
4.2.03		Penyelenggara an Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			100%	2.819.520.184,00	0	0	33,33	275.682.000,00	33,33	394.582.000,00	33,33	1.521.984.543,00	100	2.192.248.543,00
4.2.03.3		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1,00 Laporan	2.563.360.184,00	0	0	1	275.682.000,00	0	394.582.000,00	0	1.361.716.523,00	1	2.031.980.523,00
4.2.03.5		Sosialisasi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan			1,00 Laporan	156.160.000,00	0	0	0	0	0	1	79.589.784,00	1	79.589.784,00	

Kode	Sasaran RKPd	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2025 (Akhir Periode Renstra PD)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
								I		II		III		IV			
1	2	3	4	5		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan														
						100%											
4.2.03.8		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungja wabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan			1,00 Dokumen	100.000.000,00	0	0	0	0	1	0	0	80.678.236,00	1	80.678.236,00
4.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			100%	222.667.000,00	0	0	0	0	0	0	100	177.871.500,00	100	177.871.500,00
4.2.04.1		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1,00 Laporan	222.667.000,00	0	0	0	0	0	0	1	177.871.500,00	1	177.871.500,00
2.12.5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUK AN	Persentase Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Buku Profil Kependudukan	100,00%	175.400.659,00	100,00 %	109.440.000,00	0	0	0	0	0	0	100	93.673.277,00	100	93.673.277,00
5.2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Pemutahiran Profil Kependudukan			100%	109.440.000,00	0	0	0	0	0	0	100	93.673.277,00	100	93.673.277,00
5.2.01.2		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			1,00 Dokumen	109.440.000,00	0	0	0	0	0	0	1	93.673.277,00	1	93.673.277,00

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2026, merupakan salah satu upaya implementasi Visi Kota Bekasi yaitu **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”** serta Misi **“Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren”**, yang merupakan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode Tahun 2025-2029.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Kota Bekasi Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Adapun tugas pokok dan fungsi Disdukcapil sebagaimana Peraturan Wali Kota Bekasi tersebut adalah sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi Tahun 2025-2030 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan indikator sasaran/ndikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						REALISASI TAHUN			CATATAN ANALISIS
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025 (TW II)	2026	
Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan yang berkualitas	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,46%	74,50%	76,00%	77,50%	78,50%	79,75%	82,00%	92,48%	-	-	Terdapat penurunan target dari baseline data tahun 2024 dikarenakan terdapat pengurangan jumlah indikator yang mengacu pada target Renstra Provinsi Tahun 2025 – 2029
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,20	85,15	87,1	88,1	89,1	90,1	91,1	93,71	95,57	-	Merupakan target Renstra 2025 – 2029.
		Nilai AKIP Disdukcapil	78.75 (BB)	78,80 (BB)	79,00 (BB)	79,50 (BB)	80,00 (A)	80,5 (A)	81,00 (A)	81.59 (A)	-	-	

Capaian kinerja Disdukcapil Kota Bekasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 (Triwulan II tahun 2025) berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi memiliki target BB (78.80) dan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 belum dapat direalisasikan karena evaluasi terhadap LKIP dilakukan pada periode akhir tahun;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada Triwulan II mencapai indeks /nilai dengan capaian sebesar 95.57 dari nilai yang telah ditentukan sebesar 87.1;
- c. Persentase cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2025 ditetapkan sebesar 74.50%.

Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Kota Bekasi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disdukcapil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ;

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud

pertanggungjawaban Kementerian/Lembaga (K/L) atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan dukungan atas target nilai AKIP Kota Bekasi. Nilai AKIP diberikan oleh Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP dan dokumen SAKIP. Nilai AKIP diperoleh dengan cara perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Nilai AKIP} &= \text{Nilai komponen perencanaan kinerja} + \text{nilai} \\ &\quad \text{komponen pengukuran kinerja} + \text{nilai} \\ &\quad \text{komponen pelaporan kinerja} + \text{nilai} \\ &\quad \text{komponen evaluasi internal} + \text{nilai} \\ &\quad \text{komponen capaian kinerja} \end{aligned}$$

b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka perlu melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Survey kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survey ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan

pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik. dalam melakukan survey kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik dimana untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik baik yang bersifat barang, jasa maupun administrasi digunakan 9 (sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan saran dan masukan.

Indikator	Perumusan
Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah IKM per Unsur
	Total Unsur Terisi

- c. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indikator cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perhitungan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilakukan dengan rumus :

$$\text{Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil} = \frac{\text{prosentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk} + \text{prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil}}{2}$$

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

- a. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi Pemerintah di bidang penyelenggaraan adminduk (UU Nomor 24 Th 2013, PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus - menerus, antara lain melalui:
 - Updating aplikasi sesuai dengan kebutuhan untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi ke dalam satu sistem, yaitu SIAK;
 - Pemutakhiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online

- b. Mekanisme/pola penyimpanan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui teknologi;
- c. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat;
- d. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (penanggulangan kemiskinan, dll);
- f. Kajian, penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Terbatasnya kewenangan yang tercantum pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di mana kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi hanya pada penyusunan Profil perkembangan kependudukan daerah;
- i. Akurasi data kependudukan di Kota Bekasi yang masih harus ditingkatkan. masih ada jumlah Data Ganda dan Data Anomali yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi:

1. Landasan hukum kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, sehingga menegaskan kewenangan Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan;
2. Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi;
3. Implementasi Standar Manajemen Mutu;
4. Adanya motivasi belajar aparatur yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi :

1. Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai sesuai kebutuhan;
2. Belum memadainya sarana dan prasarana;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu prasyarat dalam pencapaian tujuan, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan.

c. Faktor Peluang Organisasi :

1. Adanya penerapan nyata Undang- Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016; Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Profesional dalam Pelayanan Administrasi

Kependudukan yang Berbasis Teknologi Informasi

2. Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan sistem. Hal tersebut juga berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempermudah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga memudahkan stakeholder untuk mengakses pelayanan tersebut.

d. Faktor Tantangan Organisasi :

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima; Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sebuah hal yang harus dilakukan;
2. Adanya pola pikir masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sulit, mahal dan berbelit-belit.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja

program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD.

Tabel 2.4
Review Terhadap Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Disdukcapi			24.096.051.440	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Disdukcapi			24.096.051.440
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapi	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan	5 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disdukcapi	Jumlah Laporan Dokumen Perencanaan	5 Laporan	3.000.000
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang /bulan	14.523.518.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disdukcapi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang /bulan	14.523.518.000

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disdukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	3.000.000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disdukcapil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Disdukcapil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20.000.000
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disdukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	15.000.000

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Disediakan					Disediakan		
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dis dukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	266.980.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dis dukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	266.980.000
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dis dukcapil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	41.040.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dis dukcapil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	41.040.000
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dis dukcapil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1850 Dokumen	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dis dukcapil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1850 Dokumen	25.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dis dukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	100.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dis dukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	100.500.000

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SKPD					SKPD		
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dis dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dis dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dis dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.149.621.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dis dukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.149.621.440
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dis dukcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	128.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dis dukcapil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	128.000.000

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dis dukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	120.392.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dis dukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	120.392.000
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dis dukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dis dukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	50.000.000
15	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dis dukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dis dukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000
	Program Pendaftaran Penduduk	Dis dukcapil			3.230.000.000	Program Pendaftaran Penduduk	Dis dukcapil			3.230.000.000

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	50.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	50.000.000
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	100.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	100.000.000
3	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	3.000.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan	3.000.000.000
4	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran	1 Laporan	80.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran	1 Laporan	80.000.000

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penduduk					Penduduk		
B	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil			400.000.000	Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil			400.000.000
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.000 Dokumen	300.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Disdukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	100.000 Dokumen	300.000.000
2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 Layanan	100.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	3 Layanan	100.000.000
C	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil			3.682.176.608	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil			3.682.176.608

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	75.000.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	6 Dokumen	75.000.000
2	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	3.442.176.608	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	3.442.176.608
3	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Sosialisasi	1 Paket	165.000.000	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapi	Jumlah Sosialisasi	1 Paket	165.000.000
D	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapi			185.000.000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Disdukcapi			185.000.000

RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 dokumen	50.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	3 dokumen	50.000.000
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 dokumen	135.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Disdukcapi	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	3 dokumen	135.000.000
					31.593.228.048					31.593.228.048

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2026, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan lembaga dan asosiasi- asosiasi penyiaran. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan masukan dari asosiasi-asosiasi penyiaran dan aspirasi masyarakat dalam Forum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Namun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi telah mempunyai Program dan Kegiatan rutin dimana salah satu sasaran kegiatannya adalah Kecamatan se- Kota Bekasi. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Data Kependudukan.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (N)		Penanggung Jawab
					Tahun 2026		
					Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota		33.114.987.000	
	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76%	4.250.000.000	
		Program Pencatatan Sipil		Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	96%	700.000.000	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		Pelayanan Pencatatan Sipil				400.000.000	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	4 Layanan	200.000.000	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan dokumen pelaporan peristiwa penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitakn atas Pelaporan Peristiwa Penting	2 Dokumen	200.000.000	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				100.000.000	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	100.000.000	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				200.000.000	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	200.000.000	
							,

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (N)		Penanggung Jawab
					Tahun 2026		
					Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Pendaftaran Penduduk		Cakupan Penerbitan KIA	55%	3.550.000.000	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk				350.000.000	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	150.000.000	
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Penduduk Non Permanen dan Penduduk Rentan	1 Laporan	150.000.000	
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk		50.000.000	
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				3.200.000.000	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	3.000.000.000	
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	200.000.000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase pemanfaatan data	40%	2.642.812.000	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				150.000.000	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terkait PIAK dan Pengawasan terkait PIAK dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	150.000.000	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2.292.812.000	
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Laporan	1.993.612.000	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (N)		Penanggung Jawab
					Tahun 2026		
					Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kependudukan	Kependudukan			
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	100.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	199.200.000	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				150.000.000	
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	150.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Pemutakhiran profil kependudukan	100%	150.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
		Penyusunan Profil Kependudukan				150.000.000	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Pemutakhiran Profil Kependudukan	1 Dokumen	150.000.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	95%	29.684.457.115	
				Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	91.05%		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (N)		Penanggung Jawab
					Tahun 2026		
					Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	89.18%		
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	96%		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan	7 Dokumen	10.000.000	Sekretariat
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	15.000.000	Sekretariat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25.162.322.000	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Premi BPJS	1.820 Orang	25.147.322.000	Sekretariat
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5 Laporan	15.000.000	Sekretariat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.101.478.000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Sekretariat
			Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	676.478.000	Sekretariat
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	70.000.000	Sekretariat
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Dokumen	25.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (N)		Penanggung Jawab
					Tahun 2026		
					Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	Sekretariat
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000000 Dokumen	35.000.000	Sekretariat
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	30.000.000	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.582.900.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	12 Laporan	1.074.400.000	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening	12 Laporan	508.500.000	Sekretariat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerrintahan Daerah				250.000.000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin yang disediakan	5 jenis	928.797.115	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				583.960.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Jabatan	6 unit	158.500.000	Sekretariat
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	9 unit	150.460.000	Sekretariat
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor	7 Unit	75.000.000	Sekretariat
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan / jenis pemeliharaan	1 Unit	200.000.000	Sekretariat

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026 (N)		Penanggung Jawab
					Tahun 2026		
					Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penataan Organisasi				300.000.000	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	150.000.000	Sekretariat
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	150.000.000	Sekretariat

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi, pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi merupakan implementasi dari Renstra. Implementasi dari Renstra dimaksudkan diarahkan untuk peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kantor, Pengelolaan dan Pengembangan Database Kependudukan yang berbasis TI, Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pemanfaatan Database Administrasi Kependudukan.

Hasil implementasi yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memenuhi cakupan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Cakupan Penerbitan KTP-el 98,15%, Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 65,80%, Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga 89,67%, Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan 60,29%, Cakupan Penerbitan Akta Kematian 64,20%.

Dalam upaya memenuhi cakupan-cakupan dokumen kependudukan memang dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit pada periode saat ini anggaran yang tersedia masih belum dapat memenuhi kebutuhan yang direncanakan, diharapkan pada periode selanjutnya masih dibutuhkan penambahan anggaran mengingat proses penyelenggaraan administrasi kependudukan kita arahkan kepada layanan berbasis TI.

Pelaksanaan dari penyelenggaraan cakupan-cakupan yang telah ditetapkan diselenggarakan dengan mengacu kepada Undang-undang 24 tahun 2014

Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232), Permendagri Nomor 69 Tahun 2102 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 03 Seri E), Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 27 Seri E). Dari kaidah- kaidah hukum dimaksud penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bekasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan sangat bergantung pada komitmen seluruh aparaturnya, konsistensi sangat diperlukan, capaian cakupan yang telah dilakukan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam merencanakan Rencana Kerja di periode selanjutnya.

Pelaksanaan rencana kerja saat ini diharapkan mampu mendorong untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) di periode selanjutnya.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai bahan kajian lebih lanjut.

Bekasi, 30 Maret 2026



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

Dr. TAUFIQ R HIDAYAT, AP, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c NIP.
19751001 199311 1 002